



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 93  
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 93 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 93), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JEMBATAN	PARAF
1	DR.H.SUBIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS.H.ABDMUDDIN HZ, M.SI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMANI JAUHARI, SH	PLT. KEPALA BIRU HUKUM	
4	DRS.H.ABDUL MANSUR SIM, SI	KEPALA BIRU ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 67-

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DRS.H.ZAINUDDIN H.Z.M.GI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARTMAN JAUHARY CH	PLT.KEPALA BIRO HUKUM	
3	DRS.H.ABDUL MAJID S.M.SI	KEPALA BIRO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 67

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 67 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR  
93 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN  
KERJA PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
I	Kepala Badan	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengemudi				1		
	2) Pengadministrasi Umum				1		
	3) Pranata Kearsipan				1		
	4) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian				1		
	5) Pengelola Kepegawaian				1		
	6) Pengelola Barang Milik Negara				1		
	7) Jurnalis				1		
	8) Pengelola Pengaduan Publik				1		
	9) Analis Data dan Informasi				1		
	10) Analis Barang Milik Negara				1		
	11) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi				1		

	b. Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan			1		
	1) Pengadministrasi Keuangan				1	
	2) Pengelola Keuangan				1	
	3) Verifikator Keuangan				1	
	4) Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan				1	
	5) Pengelola Program dan Kegiatan				1	
	6) Analis Pengelola Keuangan				1	
	7) Bendahara				2	
	8) Analis Pelayanan				1	
	9) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja				1	
	10) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				1	
	11) Analis Rencana Program dan Kegiatan				1	
	2. Kepala Bidang Pajak Daerah		1			
	a. Kepala Sub Bidang Potensi dan Analisis Pajak			1		
	1) Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				1	
	2) Analis Pajak dan Retribusi Daerah				1	
	3) Analis Data dan Informasi				1	
	4) Penyusun Rencana Kebijakan				1	
	b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah			1		
	1) Pengelola Pajak Daerah				1	
	2) Analis Pendapatan Daerah				1	
	3) Analis Penagihan Pajak				1	
	c. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak Daerah			1		
	1) Pengolah Data Kebijakan Dana Bagi Hasil				1	
	2) Analis Pajak dan Retribusi Daerah				1	
	3) Analis Dana Bagi Hasil				1	

3.	Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain		1			
	a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah			1		
	1) Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi				1	
	2) Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah				1	
	3) Pengelola Retribusi Daerah				1	
	4) Analis Retribusi Daerah				1	
	b. Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain			1		
	1) Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan				1	
	2) Pengelola Laporan Data Penerimaan				1	
	3) Analis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	4) Penyusun Rencana Kebijakan					
	c. Kepala Sub Bidang Analisa Pendapatan Asli Daerah			1		
	1) Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah				1	
	2) Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah				2	
	3) Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan					
	4) Analis Pendapatan Daerah		1			
4.	Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kota Tarakan			1		
	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha				1	
	1) Pramuk Bakti				3	
	2) Pengemudi				1	
	3) Petugas Keamanan				3	
	4) Pengadministrasi Keuangan				2	
	5) Pengadministrasi Kepegawaian				5	
	6) Pengadministrasi Umum				1	

	7) Verifikator Keuangan			1	
	8) Pengelola Barang Milik Negara			2	
	9) Bendahara			1	
	b. Kasi Pendataan dan Penetapan		1		
	1) Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah			1	
	2) Pengelola Data dan Potensi Pajak			1	
	3) Pengelola Data Pelayanan Perpajakan			1	
	4) Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi			1	
	5) Analis Pemeriksa Pajak			3	
	6) Analis Pajak Daerah			2	
	c. Kasi Pembukuan dan Penagihan		1		
	1) Pengadministrasi Pajak			2	
	2) Pengolah Data Penagihan Pajak			3	
	3) Analis Penagihan Pajak			2	
	4) Analis Pajak Daerah			2	
5.	Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kab. Bulungan	1			
	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha		1		
	1) Pramu Bakti			1	
	2) Pengemudi			1	
	3) Petugas Keamanan			1	
	4) Pengadministrasi Keuangan			3	
	5) Pengadministrasi Kepegawaian			2	
	6) Pengadministrasi Umum			2	
	7) Verifikator Keuangan			1	
	8) Pengelola Barang Milik Negara			1	
	9) Bendahara			2	
	b. Kasi Pendataan dan Penetapan		1		
	1) Pengadministrasi Pajak			2	
	2) Pengelola Data dan Potensi Pajak			1	
	3) Pengelola Data Pelayanan Perpajakan			1	
	4) Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi			1	

	5) Analis Pemeriksa Pajak				1		
	6) Analis Pajak Daerah				1		
	c. Kasi Pembukuan dan Penagihan			1			
	1) Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah				1		
	2) Pengolah Data Penagihan Pajak				1		
	3) Analis Penagihan Pajak				1		
6.	Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kab. Malinau		1				
	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pramu Bakti				0		
	2) Pengemudi				0		
	3) Petugas Keamanan				0		
	4) Pengadministrasi Keuangan				2		
	5) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	6) Pengadministrasi Umum				1		
	7) Verifikator Keuangan				1		
	8) Pengelola Barang Milik Negara				1		
	9) Bendahara				1		
	b. Kasi Pendataan dan Penetapan			1			
	1) Pengadministrasi Pajak				1		
	2) Pengelola Data dan Potensi Pajak				1		
	3) Pengelola Data Pelayanan Perpajakan				1		
	4) Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi				1		
	5) Analis Pemeriksa Pajak				1		
	6) Analis Pajak Daerah				1		
	c. Kasi Pembukuan dan Penagihan			1			
	1) Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah				1		
	2) Pengolah Data Penagihan Pajak				1		
	3) Analis Penagihan Pajak				1		
7.	Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kab. Nunukan		1				
	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pramu Bakti				1		

	2) Pengemudi			1	
	3) Petugas Keamanan			1	
	4) Pengadministrasi Keuangan			4	
	5) Pengadministrasi Kepegawaian			2	
	6) Pengadministrasi Umum			2	
	7) Verifikator Keuangan			1	
	8) Pengelola Barang Milik Negara			1	
	9) Bendahara			2	
	b. Kasi Pendataan dan Penetapan		1		
	1) Pengadministrasi Pajak			2	
	2) Pengelola Data dan Potensi Pajak			1	
	3) Pengelola Data Pelayanan Perpajakan			0	
	4) Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi			0	
	5) Analis Pemeriksa Pajak			0	
	6) Analis Pajak Daerah			0	
	c. Kasi Pembukuan dan Penagihan		1		
	1) Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah			0	
	2) Pengolah Data Penagihan Pajak			1	
	3) Analis Penagihan Pajak			1	
8.	Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kab. Tana Tidung		1		
	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha		1		
	1) Pramu Bakti			2	
	2) Pengemudi			1	
	3) Petugas Keamanan			2	
	4) Pengadministrasi Keuangan			2	
	5) Pengadministrasi Kepegawaian			2	
	6) Pengadministrasi Umum			1	
	7) Verifikator Keuangan			1	
	8) Pengelola Barang Milik Negara			1	
	9) Bendahara			2	
	b. Kasi Pendataan dan Penetapan		1		

	1) Pengadministrasi Pajak				2		
	2) Pengelola Data dan Potensi Pajak				1		
	3) Pengelola Data Pelayanan Perpajakan				1		
	4) Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi				1		
	5) Analis Pemeriksa Pajak				1		
	6) Analis Pajak Daerah				1		
	c. Kasi Pembukuan dan Penagihan			1			
	1) Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah				1		
	2) Pengolah Data Penagihan Pajak				1		
	3) Analis Penagihan Pajak				1		
9.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. JF Pranata Komputer Pertama					1	
	b. JF Pranata Komputer Muda					1	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>166</b>	<b>2</b>	
	<b>Jumlah Total</b>			<b>200</b>			

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,





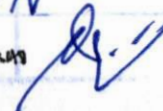
IRIANTO LAMBRIE

	1) Pengadministrasi Pajak				2		
	2) Pengelola Data dan Potensi Pajak				1		
	3) Pengelola Data Pelayanan Perpajakan				1		
	4) Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi				1		
	5) Analis Pemeriksa Pajak				1		
	6) Analis Pajak Daerah				1		
	c. Kasi Pembukuan dan Penagihan			1			
	1) Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah				1		
	2) Pengolah Data Penagihan Pajak				1		
	3) Analis Penagihan Pajak				1		
9.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. JF Pranata Komputer Pertama					1	
	b. JF Pranata Komputer Muda					1	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>166</b>	<b>2</b>	
	<b>Jumlah Total</b>			<b>200</b>			

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

No	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	DR.H. GURIANSYAH.M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS.H. ZAINUDDIN HZ,MSI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JALIHARI .SH	PLT-KEPALA BIRO HUKUM	
4	DRS.H.ABUL MAJID S.M.S	KEPALA BIRO ORGANISASI	

	1) Pengadministrasi Pajak				2		
	2) Pengelola Data dan Potensi Pajak				1		
	3) Pengelola Data Pelayanan Perpajakan				1		
	4) Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi				1		
	5) Analis Pemeriksa Pajak				1		
	6) Analis Pajak Daerah				1		
	c. Kasi Pembukuan dan Penagihan		1				
	1) Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah				1		
	2) Pengolah Data Penagihan Pajak				1		
	3) Analis Penagihan Pajak				1		
9.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. JF Pranata Komputer Pertama					1	
	b. JF Pranata Komputer Muda					1	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>166</b>	<b>2</b>	
	<b>Jumlah Total</b>			<b>200</b>			

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 67

No	NAMA	JABATAN	PASIF
1	DRS.H.ZAINUDDIN H2,M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI ,SH	PLH. KEPALA BIRU HUKUM	
3	DRS.H.ABDUL MANSUR S.M.Si	KEPALA BIRU ORGANISASI	

	1) Pengadministrasi Pajak				2		
	2) Pengelola Data dan Potensi Pajak				1		
	3) Pengelola Data Pelayanan Perpajakan				1		
	4) Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi				1		
	5) Analis Pemeriksa Pajak				1		
	6) Analis Pajak Daerah				1		
	c. Kasi Pembukuan dan Penagihan			1			
	1) Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah				1		
	2) Pengolah Data Penagihan Pajak				1		
	3) Analis Penagihan Pajak				1		
9.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. JF Pranata Komputer Pertama					1	
	b. JF Pranata Komputer Muda					1	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>166</b>	<b>2</b>	
	<b>Jumlah Total</b>			<b>200</b>			

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

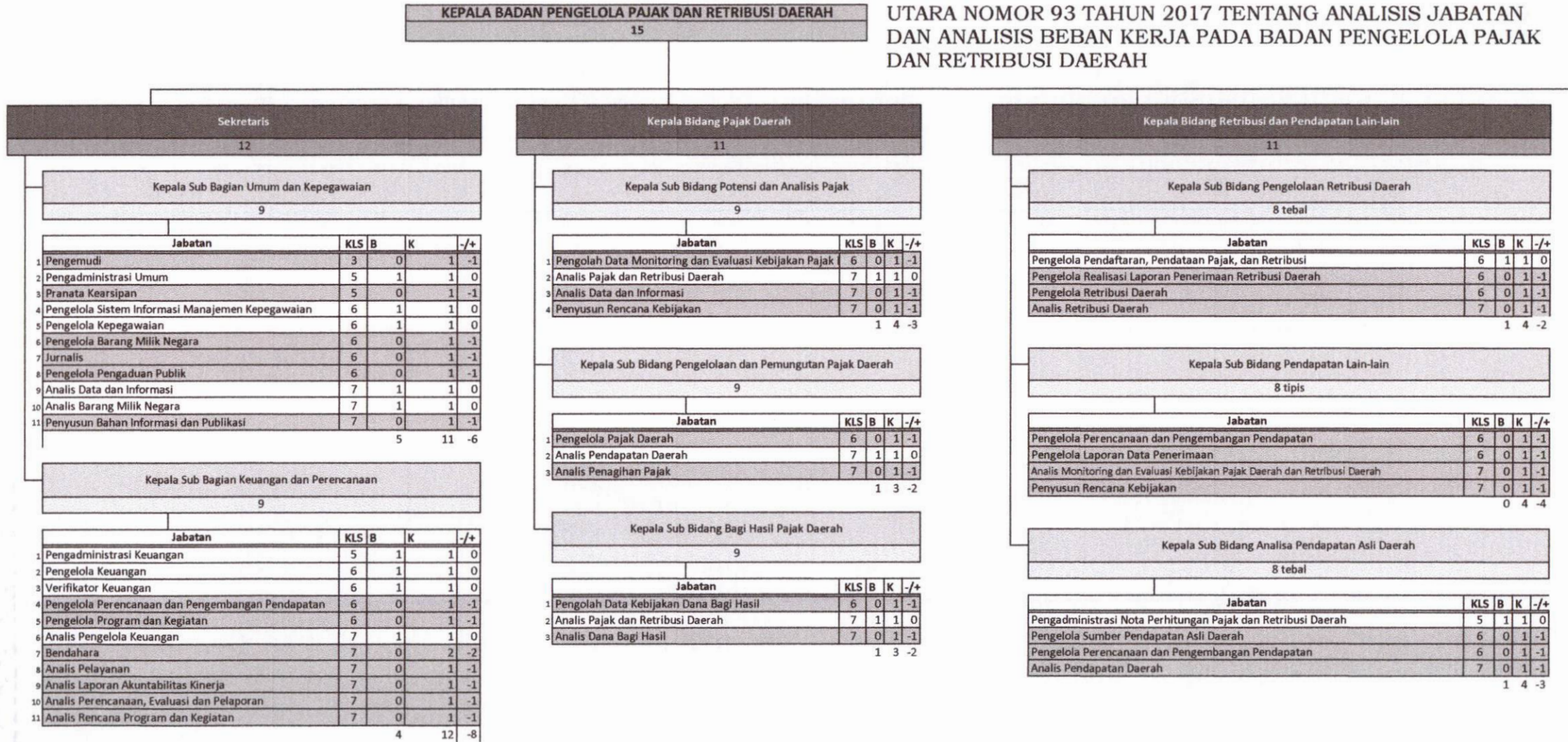
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 67 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
 UTARA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN  
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGELOLA PAJAK  
 DAN RETRIBUSI DAERAH

**PETA JABATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**



**10**  
Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kabupaten Malinau

Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
8 tebal

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	0	0	0	0
Pengemudi	3	0	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0	0
Pengadmnistrasi Keuangan	5	2	2	0	0
Pengadmnistrasi Kepegawalan	5	2	2	0	0
Pengadmnistrasi Umum	5	0	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	1	-1
Bendahara	7	0	1	1	-1

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pengadmnistrasi Pajak	5	0	1	1	-1
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	0	1	1	-1
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	0	1	1	-1
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	1	1	-1
Analisis Pemeriksa Pajak	7	0	1	1	-1
Analisis Pajak Daerah	7	0	1	1	-1

Kasi Pendataan dan Penetapan  
8 tipis

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pengadmnistrasi Pajak	5	0	1	1	-1
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	0	1	1	-1
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	0	1	1	-1
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	1	1	-1
Analisis Pemeriksa Pajak	7	0	1	1	-1
Analisis Pajak Daerah	7	0	1	1	-1

Kasi Pembukuan dan Penagihan  
8 tipis

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pengadmnistrasi Pajak	5	0	1	1	-1
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	1	1	-1
Analisis Penagihan Pajak	7	0	1	1	-1

**10**  
Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kabupaten Bulungan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
8 tebal

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	1	1	0	0
Pengemudi	3	0	1	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	1	1	-1
Pengadmnistrasi Keuangan	5	3	3	0	0
Pengadmnistrasi Kepegawalan	5	1	2	1	-1
Pengadmnistrasi Umum	5	1	2	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	1	-1
Bendahara	7	0	2	2	-2

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pengadmnistrasi Pajak	5	2	2	0	0
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	0	1	1	-1
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	0	1	1	-1
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	1	1	-1
Analisis Pemeriksa Pajak	7	0	1	1	-1
Analisis Pajak Daerah	7	0	1	1	-1

Kasi Pendataan dan Penetapan  
8 tebal

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pengadmnistrasi Pajak	5	2	2	0	0
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	0	1	1	-1
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	0	1	1	-1
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	1	1	-1
Analisis Pemeriksa Pajak	7	0	1	1	-1
Analisis Pajak Daerah	7	0	1	1	-1

Kasi Pembukuan dan Penagihan  
8 tipis

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pengadmnistrasi Pajak dan Retribusi Daerah	5	0	1	1	-1
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	1	1	-1
Analisis Penagihan Pajak	7	0	1	1	-1

**10**  
Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kota Tarakan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
8 tebal

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	1	1	0	0
Pengemudi	3	0	3	-3	0
Petugas Keamanan	3	0	1	1	-1
Pengadmnistrasi Keuangan	5	3	3	0	0
Pengadmnistrasi Kepegawalan	5	1	2	1	-1
Pengadmnistrasi Umum	5	4	5	-1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	1	-1
Bendahara	7	0	2	2	-2

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pengadmnistrasi Pajak dan Retribusi Daerah	5	1	1	0	0
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	0	1	1	-1
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	0	1	1	-1
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	1	1	-1
Analisis Pemeriksa Pajak	7	1	3	0	0
Analisis Pajak Daerah	7	1	3	0	0

Kasi Pendataan dan Penetapan  
9

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pengadmnistrasi Pajak dan Retribusi Daerah	5	1	1	0	0
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	0	1	1	-1
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	0	1	1	-1
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	1	1	-1
Analisis Pemeriksa Pajak	7	1	3	0	0
Analisis Pajak Daerah	7	1	3	0	0

Kasi Pembukuan dan Penagihan  
9

Jabatan	KL	S	B	K	-/+
Pengadmnistrasi Pajak	5	1	2	-1	0
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	3	-3	0
Analisis Penagihan Pajak	7	1	2	-1	0

4 Analisis Pajak Daerah -1

3 Analisis Penagihan Pajak -1

2 Pengolah Data Penagihan Pajak -3

1 Pengadmnistrasi Pajak -1

**Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kabupaten Nunukan**  
10

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
8 tebal

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	1	1	0
Pengemudi	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	4	-2
Pengadministrasi Kepegawalan	5	1	2	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	2	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Bendahara	7	0	2	-2
				5 15 -10

**Kasi Pendataan dan Penetapan**  
8 tebal

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Pajak	5	2	2	0
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	1	1	0
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	0	0	0
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	0	0
Analisis Pemeriksa Pajak	7	0	0	0
Analisis Pajak Daerah	7	0	0	0
				3 3 0

**Kasi Pembukuan dan Penagihan**  
8 tipis

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	0	0	0
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	1	-1
Analisis Penagihan Pajak	7	0	1	-1
				0 2 -2

**Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kabupaten Tana Tidung**

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
8 tebal

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	0	2	-2
Pengemudi	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	2	-2
Pengadministrasi Keuangan	5	1	2	-1
Pengadministrasi Kepegawalan	5	0	2	-2
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Bendahara	7	0	2	-2
				2 14 -12

**Kasi Pendataan dan Penetapan**  
8 tebal

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Pajak	5	0	2	-2
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	0	1	-1
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	1	1	0
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	1	-1
Analisis Pemeriksa Pajak	7	0	1	-1
Analisis Pajak Daerah	7	0	1	-1
				1 7 -6

**Kasi Pembukuan dan Penagihan**  
8 tipis

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	0	1	-1
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	1	-1
Analisis Penagihan Pajak	7	0	1	-1
				0 3 -3

Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
JF Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0
JF Pranata Komputer Muda	9	0	1	-1
				1 2 -1

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	-/+
Eselon II	0	1	-1
Eselon III	8	8	0
Eselon IV	22	23	-1
Fungsional	1	2	-1
Pelaksana	53	166	-113
Kurang	84	200	-116

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kabupaten Nunukan				
10				
Kepala Sub Bagian Tata Usaha				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	1	1	0
Pengemudi	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	4	-2
Pengadministrasi Kepegawalan	5	1	2	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	2	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Bendahara	7	0	2	-2
5 15 -10				
Kasi Pendataan dan Penetapan				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Pajak	5	2	2	0
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	1	1	0
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	0	0	0
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	0	0
Analisis Pemeriksa Pajak	7	0	0	0
Analisis Pajak Daerah	7	0	0	0
3 3 0				
Kasi Pembukuan dan Penagihan				
8 tipis				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	0	0	0
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	1	-1
Analisis Penagihan Pajak	7	0	1	-1
0 2 -2				




Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kabupaten Tana Tidung				
Kepala Sub Bagian Tata Usaha				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	0	2	-2
Pengemudi	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	2	-2
Pengadministrasi Keuangan	5	1	2	-1
Pengadministrasi Kepegawalan	5	0	2	-2
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Bendahara	7	0	2	-2
2 14 -12				
Kasi Pendataan dan Penetapan				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Pajak	5	0	2	-2
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	0	1	-1
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	1	1	0
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	1	-1
Analisis Pemeriksa Pajak	7	0	1	-1
Analisis Pajak Daerah	7	0	1	-1
1 7 -6				
Kasi Pembukuan dan Penagihan				
8 tipis				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	0	1	-1
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	1	-1
Analisis Penagihan Pajak	7	0	1	-1
0 3 -3				

Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
JF Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0
JF Pranata Komputer Muda	9	0	1	-1
1 2 -1				

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	-/+
Eselon II	0	1	-1
Eselon III	8	8	0
Eselon IV	22	23	-1
Fungsional	1	2	-1
Pelaksana	53	166	-113
Kurang	84	200	-116

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SURIANSYAH, M.A.P	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAQJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

  
IRIANTO LAMBRIE

Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kabupaten Nunukan				
10				
Kepala Sub Bagian Tata Usaha				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	1	1	0
Pengemudi	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	4	-2
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	2	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	2	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Bendahara	7	0	2	-2
5 15 -10				
Kasi Pendataan dan Penetapan				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Pajak	5	2	2	0
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	1	1	0
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	0	0	0
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	0	0
Analisis Pemeriksaan Pajak	7	0	0	0
Analisis Pajak Daerah	7	0	0	0
3 3 0				
Kasi Pembukuan dan Penagihan				
8 tipis				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	0	0	0
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	1	-1
Analisis Penagihan Pajak	7	0	1	-1
0 2 -2				

Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kabupaten Tana Tidung				
Kepala Sub Bagian Tata Usaha				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	0	2	-2
Pengemudi	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	2	-2
Pengadministrasi Keuangan	5	1	2	-1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	2	-2
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Bendahara	7	0	2	-2
2 14 -12				
Kasi Pendataan dan Penetapan				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Pajak	5	0	2	-2
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	0	1	-1
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	1	1	0
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	1	-1
Analisis Pemeriksaan Pajak	7	0	1	-1
Analisis Pajak Daerah	7	0	1	-1
1 7 -6				
Kasi Pembukuan dan Penagihan				
8 tipis				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	0	1	-1
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	1	-1
Analisis Penagihan Pajak	7	0	1	-1
0 3 -3				

Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
JF Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0
JF Pranata Komputer Muda	9	0	1	-1
1 2 -1				

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	0	1	-1
Eselon III	8	8	0
Eselon IV	22	23	-1
Fungsional	1	2	-1
Pelaksana	53	166	-113
Kurang	84	200	-116

No.	NAMA	JABATAN	PADAT
1	Drs. H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, S.H	PLt. KARO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M. Si	KARO ORGANISASI	

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

  
SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kabupaten Nunukan				
10				
Kepala Sub Bagian Tata Usaha				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	1	1	0
Pengemudi	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	2	4	-2
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	2	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	2	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Bendahara	7	0	2	-2
				5 15 -10
Kasi Pendataan dan Penetapan				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Pajak	5	2	2	0
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	1	1	0
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	0	0	0
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	0	0
Analisis Pemeriksaan Pajak	7	0	0	0
Analisis Pajak Daerah	7	0	0	0
				3 3 0
Kasi Pembukuan dan Penagihan				
8 tipis				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	0	0	0
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	1	-1
Analisis Penagihan Pajak	7	0	1	-1
				0 2 -2

Kepala UPT. BPPRD Wilayah Kabupaten Tana Tidung				
Kepala Sub Bagian Tata Usaha				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pramu Bakti	1	0	2	-2
Pengemudi	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	2	-2
Pengadministrasi Keuangan	5	1	2	-1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	2	-2
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Bendahara	7	0	2	-2
				2 14 -12
Kasi Pendataan dan Penetapan				
8 tebal				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Pajak	5	0	2	-2
Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	0	1	-1
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	1	1	0
Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	0	1	-1
Analisis Pemeriksaan Pajak	7	0	1	-1
Analisis Pajak Daerah	7	0	1	-1
				1 7 -6
Kasi Pembukuan dan Penagihan				
8 tipis				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	0	1	-1
Pengolah Data Penagihan Pajak	6	0	1	-1
Analisis Penagihan Pajak	7	0	1	-1
				0 3 -3

Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
JF Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0
JF Pranata Komputer Muda	9	0	1	-1
				1 2 -1

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	-/+
Eselon II	0	1	-1
Eselon III	8	8	0
Eselon IV	22	23	-1
Fungsional	1	2	-1
Pelaksana	53	166	-113
Kurang	84	200	-116

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE